

**PENGARUH KEMISKINAN, PRODUK DOMESTIK
REGIONAL BRUTO DAN TINGKAT KEMISKINAN
TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
PADA 6 KABUPATEN DI JAWA TENGAH DENGAN TINGKAT
IPM TERENDAH TAHUN 2019-2024
(KABUPATEN BATANG, TEGAL, WONOSOBO,
BANJARNEGARA, PEMALANG DAN BREBES)**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi syarat memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)



Oleh :

DWI WULANDARI

NIM 4121151

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2025

**PENGARUH KEMISKINAN, PRODUK DOMESTIK
REGIONAL BRUTO DAN TINGKAT KEMISKINAN
TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
PADA 6 KABUPATEN DI JAWA TENGAH DENGAN TINGKAT
IPM TERENDAH TAHUN 2019-2024
(KABUPATEN BATANG, TEGAL, WONOSOBO,
BANJARNEGARA, PEMALANG DAN BREBES)**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi syarat memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)



Oleh :

DWI WULANDARI

NIM 4121151

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Wulandari

NIM : 4121151

Judul Skripsi : **Pengaruh Kemiskinan, Produk Domestik Regional Bruto Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada 6 Kabupaten Di Jawa Tengah Dengan Tingkat IPM Terendah Tahun 2019-2024 (Kabupaten Batang, Tegal, Wonosobo, Banjarnegara, Pemalang Dan Brebes)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 10 Desember 2025

Yang menyatakan,



Dwi Wulandari

NIM. 4121151

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Dwi wulandari

Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

c.q. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Syariah

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah dilaksanakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara/i:

Nama : Dwi Wulandari

NIM : 4121151

Judul Skripsi : **Pengaruh Kemiskinan, Produk Domestik Regional Bruto Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada 6 Kabupaten Di Jawa Tengah Dengan Tingkat IPM Terendah Tahun 2019-2024 (Kabupaten Batang, Tegal, Wonosobo, Banjarnegara, Pemalang Dan Brebes)**

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 10 Desember 2025

Pembimbing, *u.*

Farida Rohmah, S.Pd., M.Sc
NIP. 198801062019082002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Pahlawan No.52 Kajen Pekalongan, www.febi.uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara/i:

Nama : **Dwi Wulandari**
NIM : **4121151**
Judul Skripsi : **Pengaruh Kemiskinan, PDRB dan Tingkat Pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada 6 Kabupaten di Jawa Tengah Dengan IPM Terendah Tahun 2019-2024 (Kabupaten Batang, Tegal, Wonosobo, Banjarnegara, Pemalang dan Brebes)**
Dosen Pembimbing : **Farida Rohmah, S.Pd., M.Sc**

Telah diujikan pada hari Senin, 22 Desember 2025 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Dewan Penguji

Penguji I


Mumammad Aris Safi'i, M.E.I.
NIP.198510122015031004

Penguji II


Svifa Rohmah, M.M.
NIP.199408222022032001

Pekalongan, 24 Desember 2025
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. H. AM. Muli. Khafidz Ma'shum, M.Ag.
NIP.197806162003121003

MOTTO

“Langkah kecil yang dijalani dengan hati yang tenang akan selalu mengantar kita menuju tujuan yang besar. Karena kemajuan bukan tentang cepatnya berjalan, tetapi tentang keberanian untuk terus melangkah.”



PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan atas hadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan karunia-Nya, penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi dengan lancar. Karya ilmiah ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih memiliki berbagai kekurangan dan keterbatasan yang memerlukan penyempurnaan. Harapannya, penelitian ini bisa dapat berkontribusi informasi dan manfaat bagi para pembaca, khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam proses penyusunan, penulis memperoleh berbagai macam dukungan, bantuan, dan motivasi, baik secara materiil maupun nonmateriil dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan kontribusi dalam terselesaikannya skripsi ini.

1. Orang tua terkasih, Alm. Ayah dan Ibu saya yang sudah berjuang sampai titik ini.
2. Semua keluarga saya yang sudah mendukung.
3. Almamater Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Dosen Pembimbing Ibu Farida Rohmah, S.Pd., M.Sc yang selalu membimbing dalam pengerjaan skripsi.
5. Dosen Wali Bapak Bambang Sri Hartono, S.E., M.Si.
6. Sahabat seperjuangan saya Arziyah Windri Windasari dan Khotrotul Zahro yang selalu bareng dari awal kuliah sampai saat ini.
7. Teman-teman saya lainnya baik dikampus maupun di rumah yang selalu ada dan mendukung saya.
8. Dosen-dosen UIN GUSDUR semuanya yang pernah mengajar saya dan seluruh keluarga besar UIN GUSDUR.

ABSTRAK

DWI WULANDARI. Pengaruh Kemiskinan, Produk Domestik Regional Bruto, Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada 6 Kabupaten Di Jawa Tengah Dengan Tingkat Ipm Terendah Tahun 2019-2024 (Kabupaten Batang, Tegal, Wonosobo, Banjarnegara, Pemalang Dan Brebes).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dipengaruhi oleh berbagai kondisi sosial ekonomi, termasuk kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran. Kemiskinan dapat membatasi akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan, sementara pertumbuhan PDRB menggambarkan peningkatan aktivitas ekonomi daerah. Di sisi lain, tingkat pengangguran menunjukkan kemampuan suatu wilayah dalam menyediakan kesempatan kerja yang layak. Ketiga variabel ini penting karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup dan pembentukan IPM.

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kemiskinan, laju PDRB, dan tingkat pengangguran terhadap IPM pada 6 kabupaten dengan IPM terendah di Jawa Tengah selama 2019–2024. Metode penelitiannya yaitu pendekatan kuantitatif melalui regresi data panel dengan model *Fixed Effect*, serta koreksi autokorelasi menggunakan *White Cross-Section (Period Cluster)* menggunakan bantuan Eviews. Seluruh data diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan semua data dijadikan sampel penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Laju pertumbuhan PDRB berpengaruh positif tetapi tidak signifikan, yang berarti peningkatan aktivitas ekonomi berkontribusi pada naiknya IPM. Sementara itu, tingkat pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Secara simultan, ketiga variabel terbukti berpengaruh signifikan terhadap IPM. Temuan ini menegaskan bahwa upaya pengurangan kemiskinan dan penguatan pertumbuhan ekonomi perlu diprioritaskan untuk meningkatkan IPM di daerah penelitian.

Kata Kunci: Kemiskinan, PDRB, Pengangguran dan IPM.

ABSTRACT

DWI WULANDARI. The Influence of Poverty, Gross Regional Domestic Product, and Unemployment Rate on the Human Development Index in Six Regencies in Central Java with the Lowest HDI Levels in 2019–2024 (Batang, Tegal, Wonosobo, Banjarnegara, Pemalang, and Brebes).

The Human Development Index (HDI) is influenced by various socioeconomic conditions, including levels of poverty, economic growth, and unemployment. Poverty limits public access to education and health services, while GRDP growth reflects improvements in regional economic activity. Meanwhile, the unemployment rate indicates a region's ability to provide adequate employment opportunities. These variables are crucial because they are directly related to living standards and human development outcomes.

This study aims to analyze the effect of poverty, GRDP growth rate, and unemployment rate on HDI in six regencies with the lowest HDI levels in Central Java during the period 2019–2024. The study employs a quantitative approach using panel data regression with the Fixed Effect Model and applies autocorrelation correction through the White Cross-Section method. All data were obtained from Statistics Indonesia (BPS) and used as the research sample.

The results show that poverty has a negative and significant effect on HDI. The GRDP growth rate has a positive and significant effect, indicating that stronger economic activity contributes to higher HDI. Meanwhile, the unemployment rate does not have a significant effect on HDI. Simultaneously, all three variables significantly influence HDI. These findings highlight that reducing poverty and strengthening economic growth must be prioritized to improve human development in the observed regions.

Keywords: Poverty, GRDP, Unemployment, HDI.

KATA PENGANTAR

Rasa syukur saya panjatkan kepada Allah SWT berkat rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Karya ilmiah penulis susun sebagai bentuk persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak sejak masa perkuliahan hingga tahap akhir penyusunan. Oleh sebab itu, dengan segala hormat penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mutakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Dr. AM Muh. Khafidz Ma'shum, M.Ag. selaku Dekan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Dr. Kuat Ismanto, M.Ag. selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Muhammad Aris Syafi'I, M.E.I. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
5. Farida Rohmah, S.Pd., M.Sc. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini
6. Dr. Bambang Srihartono, S.E., M.Si. selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA)
7. Muhammad Aris Syafi'I, M.E.I. selaku dosen penguji I dan Syifa Rohmah, M.M. selaku dosen penguji II saat ujian skripsi saya
8. Pihak BPS Jawa Tengah yang telah banyak membantu dalam memperoleh data yang saya perlukan
9. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral
10. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Untuk pacar saya Doni Rizki Kusuma yang selalu memberikan dukungan kepada saya
12. Untuk diri saya sendiri, Dwi Wulandari terimakasih telah berjuang sampai saat ini, semoga apa yang kamu kerjakan dapat bermanfaat untuk hidupmu dan untuk banyak orang.

Sebagai penutup, penulis memohon agar Allah SWT memberikan balasan terbaik atas segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Semoga karya ilmiah ini bisa berguna dan bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan dan kajian ilmiah.



DAFTAR ISI

COVER	i
KEASLIAN KARYA.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
TRANSLITERASI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR ISTILAH.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	16
D. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Teori Pembangunan Manusia.....	19
B. Telaah Pustaka.....	43
C. Kerangka Berfikir.....	52
D. Hipotesis.....	53
BAB III METODE PENELITIAN	59
A. Jenis Penelitian.....	59
B. Pendekatan Penelitian	59
C. Setting Penelitian	60

D. Populasi dan Sampel	60
E. Variabel Penelitian	61
F. Definisi Operasional.....	61
G. Sumber Data.....	62
H. Teknik Pengumpulan Data	63
I. Metode Analisis Data Panel	64
1. Regresi Data Panel.....	64
2. Penentuan Model Estimasi.....	65
3. Penentuan Model Regresi Data Panel.....	67
4. Uji Asumsi Klasik.....	69
5. Uji Hipotesis	71
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	73
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	73
1. Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah	73
2. Gambaran Umum Kabupaten Penelitian.....	74
B. Deskripsi Variabel Penelitian	77
C. Hasil Analisis Data Panel	82
BAB V PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA.....	104

TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalihan huruf dari abjad satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin ialah huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan dalam bahasa Arab yang pada sistem tulisannya direpresentasikan dengan huruf tertentu, dalam sistem transliterasi sebagian dituangkan menggunakan huruf latin, sebagian menggunakan tanda khusus, dan sebagian lainnya memerlukan kombinasi huruf serta tanda. Berikut ini disajikan daftar huruf Arab beserta bentuk transliterasi Latinnya:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ ‘	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah dan ya	Ai	a dan i
	Fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

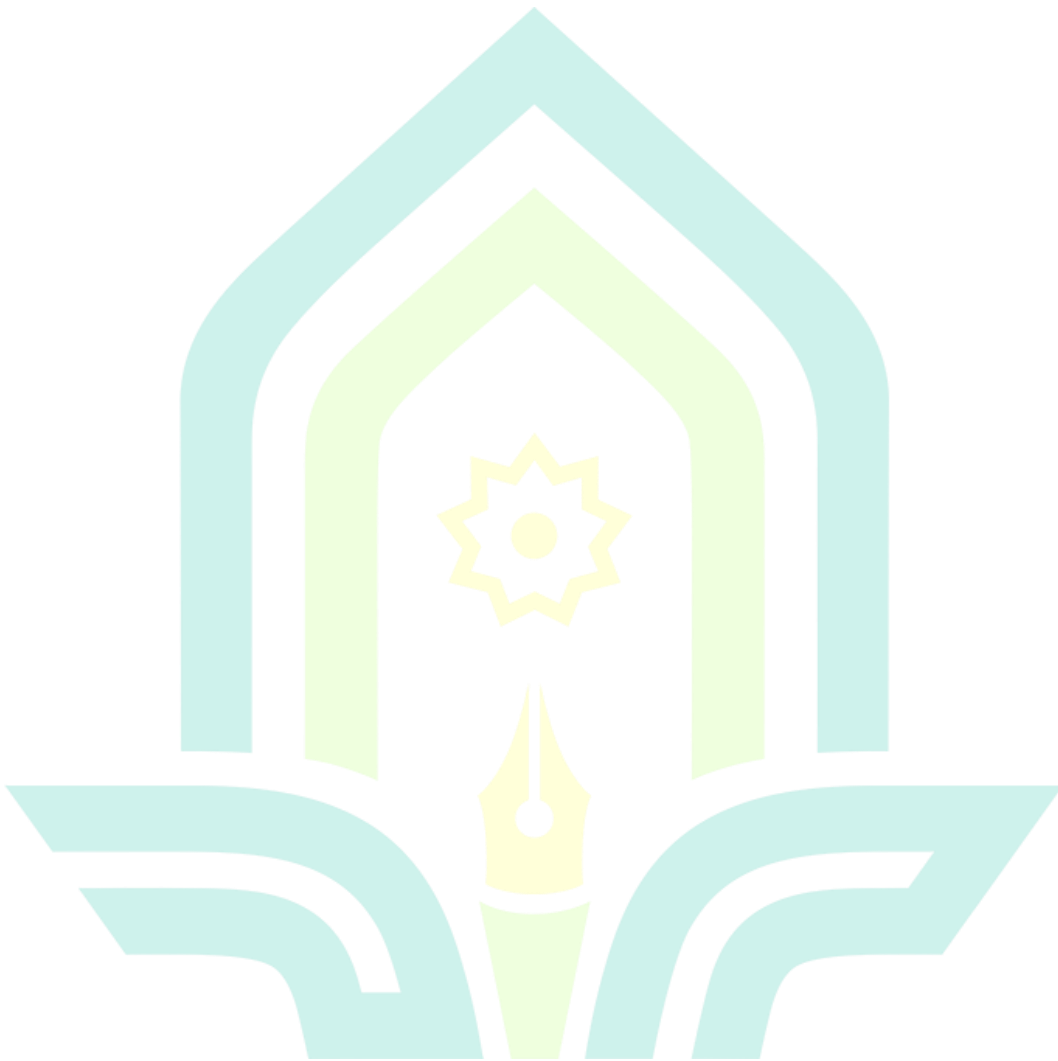
Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

DAFTAR TABEL

Table 1.1 IPM pada 6 Kabupaten Dengan IPM Terendah Tahun 2019-2024	5
Table 1.2 Tingkat Kemiskinan 6 Kabupaten IPM Terendah Tahun 2019-2024	7
Table 1.3 PDRB 6 Kabupaten/Kota IPM Terendah Tahun 2019-2024	9
Table 1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka(TPT) 6 Kab/Kota IPM Terendah.....	11
Tabel 3.1 Definisi Operasional.....	62
Tabel 3.2 Perbandingan Uji Pemilihan Model Terbaik	68
Tabel 4.1 Uji Chow	83
Tabel 4.2 Uji Hausman.....	84
Tabel 4.3 Uji LM Test	84
Tabel 4.4 Uji Normalitas	85
Tabel 4.5 Uji Multikolinieritas	85
Tabel 4.6 Uji Heteroskedastitas.....	86
Tabel 4.7 Uji Autokorelasi	86
Tabel 4.8 Hasil Regresi First Differencing.....	88
Tabel 4.9 Uji T	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 7.1 Kerangka Konseptual.....	52
--	----



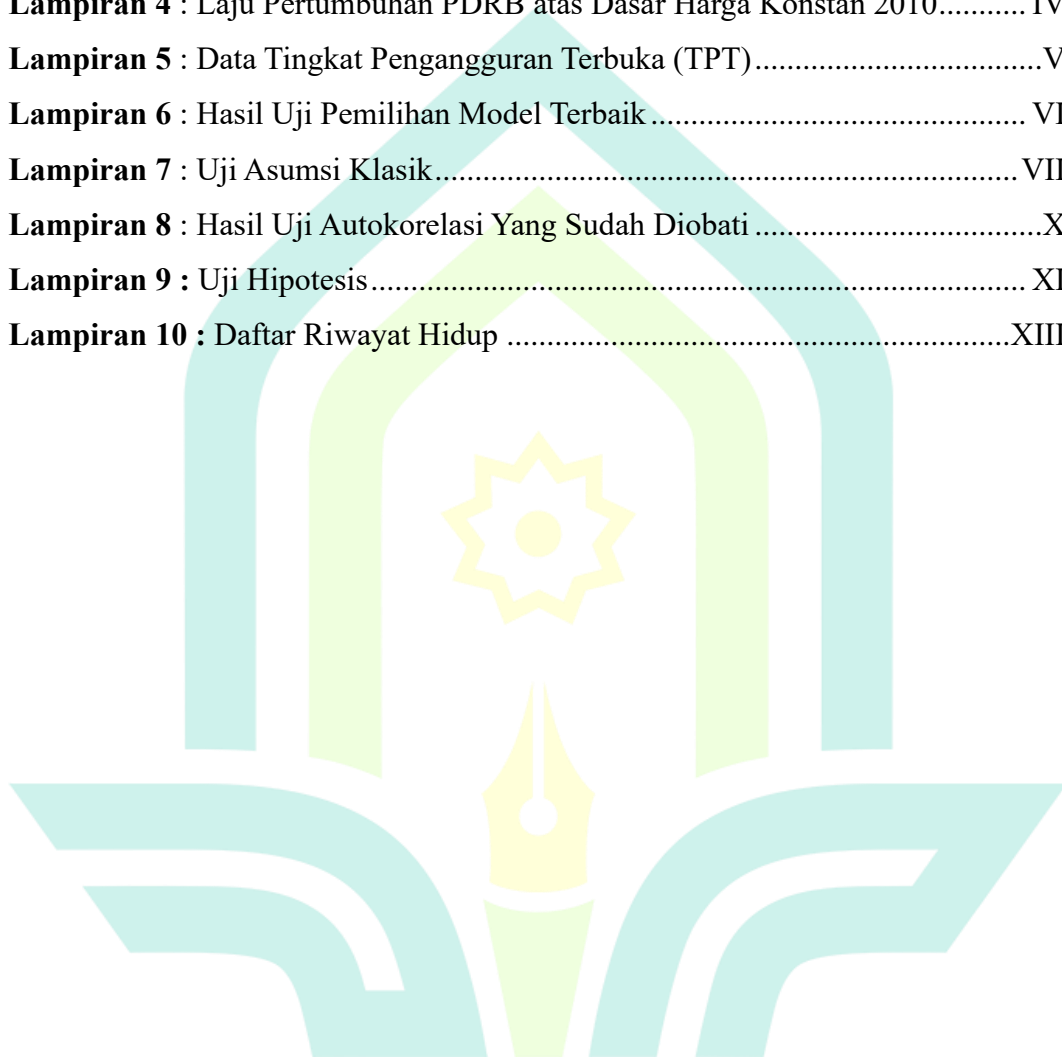
DAFTAR ISTILAH

Indeks	Angka atau rasio yang diperoleh dari serangkaian pengamatan dan digunakan sebagai indikator atau ukuran.
Komponen	Bagian dari keseluruhan unit
Elemen	Bagian yang penting, yang dibutuhkan dari keseluruhan yang lebih besar.
Krusial	Penting atau esensial untuk memecahkan masalah
Domestik	Berkenaan dengan atau mengenai permasalahan dalam negeri
Bruto	Tentang berat, gaji, hasil keuntungan, pendapatan
Indikator	Sesuatu yang dapat memberikan petunjuk atau keterangan



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Data Mentah Penelitian.....	I
Lampiran 2 : Data IPM Seluruh Kab/Kota Jateng	II
Lampiran 3 : Persentase Penduduk Miskin Semua Kab/Kota.....	III
Lampiran 4 : Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010.....	IV
Lampiran 5 : Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).....	V
Lampiran 6 : Hasil Uji Pemilihan Model Terbaik	VI
Lampiran 7 : Uji Asumsi Klasik.....	VII
Lampiran 8 : Hasil Uji Autokorelasi Yang Sudah Diobati	X
Lampiran 9 : Uji Hipotesis.....	XI
Lampiran 10 : Daftar Riwayat Hidup	XIII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan proses strategis yang menentukan arah kemajuan suatu negara karena menyangkut perbaikan kondisi ekonomi, sosial, dan kualitas hidup masyarakat. Dalam perspektif pembangunan modern, pembangunan tidak lagi dipahami sebatas peningkatan output ekonomi, tetapi mencakup perluasan pilihan hidup dan peningkatan kemampuan dasar manusia. Todaro dan Smith (2020) menjelaskan bahwa pembangunan bertujuan mengurangi kemiskinan, memperluas akses terhadap kesempatan ekonomi, serta meningkatkan standar hidup masyarakat. Dengan demikian, pembangunan menjadi instrumen utama untuk membawa masyarakat menuju kehidupan yang lebih layak, produktif, dan bermartabat.

Secara konseptual, pembangunan penting karena berkaitan dengan transformasi struktural suatu negara. Negara yang berhasil meningkatkan kapasitas ekonominya akan mampu menyediakan pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang baik, serta menciptakan pasar tenaga kerja yang inklusif. Peningkatan pendapatan nasional juga menjadi dasar bagi pemerintah untuk membiayai infrastruktur, memperkuat kelembagaan, dan memperluas jaminan sosial. Pentingnya pembangunan semakin mengemuka ketika dikaitkan dengan peningkatan kesejahteraan manusia. *United Nation Development Programme* atau UNDP (2023) menegaskan bahwa pembangunan manusia merupakan inti dari pembangunan berkelanjutan,

karena tujuan akhirnya adalah meningkatkan kualitas hidup, bukan sekadar memperbesar pendapatan.

Bukti empiris korelasi kuat antara pembangunan dan peningkatan kesejahteraan dapat ditemukan pada negara-negara yang mengalami transformasi ekonomi besar. Misalnya seperti Negara Korea Selatan dan Singapura yang berhasil mengurangi kemiskinan ekstrem menjadi kurang dari 1% setelah melaksanakan pembangunan ekonomi jangka panjang dan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara agresif selama tiga dekade terakhir (World Bank, 2023). Keberhasilan pembangunan berkelanjutan di negara-negara tersebut juga tercermin dari kenaikan umur harapan hidup yang mencapai kisaran 82–84 tahun, jauh lebih tinggi dibandingkan negara dengan tingkat pembangunan rendah yang hanya berkisar 61–65 tahun (UNDP, 2023).

Kemajuan serupa terlihat juga di Indonesia. Dalam dua dekade terakhir, berbagai indikator sosial dan ekonomi mengalami perbaikan signifikan. Data BPS mencatat bahwa tingkat kemiskinan Indonesia turun dari 24% pada 1998 menjadi 9,36% pada 2023 (BPS, 2024). BPS juga mencatat bahwa Angka Harapan Hidup (AHH) Indonesia meningkat dari 66 tahun pada tahun 2000 menjadi 73,5 tahun pada 2024, kemajuan lain terlihat pada aspek pendidikan, dimana rata-rata lama sekolah meningkat dari 7,2 tahun pada 2000 menjadi 9,3 tahun pada 2024 (BPS, 2024). Data tersebut menunjukkan bahwa pembangunan yang konsisten mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meskipun tantangan ketimpangan wilayah masih tetap ada.

Salah satu indikator penting untuk menilai keberhasilan pembangunan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI), termasuk di Indonesia (Arsyianti, 2017). Konsep pembangunan manusia perdana diperkenalkan oleh Mahbub ul Haq pada akhir tahun 1980-an, yang kemudian dikembangkan lebih lanjut bersama ekonom Amartya Sen. Pemikiran ini berangkat dari kritik terhadap pengukuran pembangunan yang sebelumnya hanya menekankan sektor ekonomi seperti pertumbuhan produk domestik bruto (PDB). Mahbub ul Haq berpendapat bahwa pembangunan seharusnya berpusat pada manusia, bukan semata pada pertumbuhan ekonomi (Mahbub ul-Haq, 1995). Gagasan tersebut kemudian diadopsi *United Nations Development Programme* (UNDP) kemudian diterbitkan resmi tahun 1990 dalam *Human Development Report* (HDR).

IPM digunakan untuk mengukur pencapaian daerah dalam mendorong mutu SDM melalui tiga aspek penting: (1) dimensi kesehatan, dipresentasikan oleh angka peluang hidup begitu lahir; (2) dimensi pendidikan, dari rata-rata dan harapan lama sekolah; serta (3) dimensi ukuran hidup cukup, digambarkan oleh tingkat daya beli masyarakat (Badan Pusat Statistik, 2021). Dalam mengukur tingkat pembangunan manusia, Badan Pusat Statistik (BPS) menerapkan klasifikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merujuk pada standar *United Nations Development Programme* (UNDP), dimana IPM dibagi menjadi empat tingkat yaitu sangat tinggi ($\geq 80,00$), tinggi (70,00–79,99), sedang (60,00–69,99), dan rendah ($< 60,00$) (UNDP, 2023). Pembagian tersebut penting untuk menilai posisi

pembangunan suatu wilayah serta mengidentifikasi kesenjangan antardaerah yang memerlukan perhatian pembangunan lebih serius.

Tahun-tahun terakhir ini, IPM Indonesia memperlihatkan perkembangan yang lumayan signifikan. Periode tahun 2019 hingga 2024 mencatat tren peningkatan yang konsisten dalam capaian IPM di Indonesia. Pada 2024, nilai IPM nasional mencapai 75,02 persen dimana meningkat 0,85 persen dibandingkan 2023. Rata-rata IPM meningkat 0,75 persen tiap tahun selama enam tahun terakhir. Meskipun terus mengalami kenaikan tiap tahunnya tapi kesenjangan IPM masih terjadi baik antar provinsi maupun antar kabupaten/kota (BPS, 2024).

Provinsi Jawa Tengah dipilih sebagai fokus penelitian karena memiliki jumlah penduduk besar dan menunjukkan variasi capaian pembangunan manusia yang cukup lebar. Data BPS (2024) menunjukkan bahwa, meskipun nilai IPM provinsi Jawa Tengah meningkat setiap tahun tetapi ketimpangan antar kabupaten/kota masih terjadi. Perbedaan capaian IPM yang cukup mencolok ini menjadikan Jawa Tengah relevan untuk dianalisis guna memahami faktor ekonomi yang memengaruhi kualitas pembangunan manusia. IPM Jawa Tengah tercatat sebesar 71,73 pada 2019 dan meningkat menjadi 73,87 ditahun 2024. Kenaikan IPM per tahun berkisar antara 0,42% hingga 0,87%, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sekitar 0,69%. Pertumbuhan ini didorong oleh perbaikan di seluruh dimensi utama pembentuk IPM, dengan kontribusi terbesar berasal dari peningkatan dalam aspek standar hidup layak dan tingkat pendidikan (BPS, 2024).

Kesenjangan kualitas pembangunan semakin tampak ketika analisis dilakukan pada tingkat kabupaten/kota, meskipun mengalami kenaikan tetapi IPM Jateng tetap di bawah rata-rata IPM nasional yang berakibat pada capaian IPM antarwilayah Jawa Tengah tidak merata. Untuk memperoleh analisis yang lebih terfokus, penelitian ini kemudian memilih enam kabupaten dengan IPM terendah yaitu Brebes, Pemalang, Banjarnegara, Wonosobo, Batang, dan Tegal yang secara konsisten mencatatkan nilai IPM terendah (BPS, 2025). Pemilihan enam kabupaten tersebut didasarkan pada kondisi IPM yang secara konsisten berada pada level terendah di Jawa Tengah selama enam tahun terakhir, sehingga wilayah ini penting untuk dikaji lebih lanjut guna memahami penyebab rendahnya capaian pembangunan manusianya serta memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana variabel ekonomi berkontribusi terhadap rendahnya capaian indeks pembangunan manusia. Berikut data IPM 6 Kabupaten terendah di Jawa Tengah:

Table 1.1 Indeks Pembangunan Manusia pada 6 Kabupaten Dengan IPM Terendah Tahun 2019-2024

KAB	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)						Rata-rata
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Batang	68,42	68,65	68,92	69,45	70,20	70,74	69,39
Tegal	68,24	68,39	68,79	69,53	70,23	70,77	69,33
Wonosobo	68,27	68,22	68,43	68,89	69,37	69,82	68,83
Banjarnegara	67,34	67,45	67,86	68,61	69,14	69,60	68,33
Pemalang	66,32	66,32	66,56	67,19	68,03	68,55	67,16
Brebes	66,12	66,11	66,32	67,03	67,95	68,46	66,99

Sumber : BPS Indonesia yang sudah diolah

Berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia pada enam kabupaten di atas, menunjukkan bahwa seluruh daerah mengalami tren peningkatan dalam periode lima tahun terakhir. Kabupaten Batang misalnya, meningkat dari 68,42 (2019) menjadi 70,14 (2024). Kabupaten Tegal naik dari 68,24 menjadi 69,95, sedangkan Kabupaten Wonosobo dari 68,27 menjadi 69,55. Kabupaten Banjarnegara juga mengalami kenaikan dari 67,34 pada 2019 menjadi 68,33 pada 2024. Sementara itu, Kabupaten Pemalang yang konsisten berada di bawah rata-rata provinsi meningkat dari 66,32 menjadi 67,16, dan Kabupaten Brebes yang memiliki IPM terendah di Jawa Tengah naik dari 66,12 pada tahun 2019 menjadi 67,16 pada tahun 2024.

Meskipun menunjukkan banyak perbaikan kualitas pembangunan manusia di tiap daerah, kesenjangan capaian antar wilayah masih terlihat jelas. Seluruh kabupaten tersebut secara konsisten mencatat IPM lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi, sehingga memperlihatkan bahwa tantangan pembangunan manusia di Jawa Tengah terletak pada pemerataan hasil pembangunan, terutama di daerah-daerah dengan capaian IPM rendah. Kondisi tersebut menunjukan pentingnya kebijakan pembangunan yang berfokus pada pengurangan kemiskinan, perbaikan mutu pendidikan dan layanan kesehatan, serta perluasan kesempatan kerja sehingga kesenjangan antarwilayah dapat ditekan seminimal mungkin.

Ada berbagai faktor yang mempengaruhi IPM, salah satunya yaitu tingkat kemiskinan. Menurut Todaro (2012) menyebutkan kemiskinan adalah permasalahan yang kompleks dan multidimensi. Jika tidak ditangani, kondisi

ini dapat memunculkan berbagai persoalan sosial baru, seperti rendahnya pendapatan, tingginya angka buta huruf, serta menurunnya derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, kemiskinan menjadi persoalan utama yang nyaris dihadapi semua negara, nasional maupun daerah. Berikut datanya :

Table 1.2 Tingkat Kemiskinan 6 Kabupaten IPM Terendah Tahun 2019-2024

Kabupaten	Persentase Kemiskinan					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Batang	8,35	9,13	9,68	8,98	8,92	8,73
Tegal	7,64	8,14	8,60	7,90	7,30	6,81
Wonosobo	16,63	17,36	17,67	16,17	15,58	15,28
Banjarnegara	14,76	15,64	16,23	15,20	14,90	14,71
Pemalang	15,41	16,02	16,56	15,06	15,03	14,92
Brebes	16,22	17,03	17,43	16,05	15,78	15,60

Sumber : BPS Indonesia

Berdasarkan data BPS Jawa Tengah, tingkat kemiskinan di enam kabupaten dengan IPM terendah periode 2019–2024 menunjukkan tren yang relatif fluktuatif, namun secara umum cenderung menurun pada tahun-tahun terakhir. Kabupaten Brebes konsisten mencatat tingkat kemiskinan tertinggi, yakni sebesar 16,22% pada 2019 dan masih berada di angka 15,90% pada 2024, jauh di atas rata-rata Jawa Tengah sebesar 10,47%. Kabupaten Pemalang juga menunjukkan angka kemiskinan cukup tinggi, yaitu 15,41% pada 2019 dan menurun menjadi 14,92% pada 2024. Kondisi serupa terjadi di Banjarnegara yang pada 2019 mencatat 14,76% dan turun menjadi 14,71%

pada 2024. Wonosobo bahkan sempat berada pada angka kemiskinan yang sangat tinggi sebesar 17,26% pada 2020, sebelum akhirnya menurun menjadi 15,28% pada 2024. Sementara itu, Kabupaten Batang dan Tegal relatif memiliki tingkat kemiskinan lebih rendah dibanding kabupaten lainnya, meskipun tetap berada di atas rata-rata provinsi. Batang misalnya, dari 8,35% pada 2019 menurun menjadi 6,81% pada 2024, sedangkan Tegal dari 7,64% pada 2019 turun tipis menjadi 8,73% pada 2024.

Data ini memperlihatkan bahwa meskipun terjadi perbaikan, tingkat kemiskinan di enam kabupaten tersebut secara konsisten berada lebih tinggi dibandingkan rata-rata Jawa Tengah, sehingga menjadi salah satu faktor penting yang menjelaskan rendahnya capaian IPM di wilayah tersebut. Kondisi ini menjadi hambatan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan ketimpangan sosial, serta akselerasi pembangunan manusia. Oleh sebab itu, penting untuk melakukan analisis mendalam guna mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi IPM.

Selain kemiskinan, faktor lain yaitu produk domestik regional bruto dimana PDRB menunjukkan kinerja pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Tingginya PDRB berpengaruh semakin banyak peluang masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Sebaliknya rendahnya PDRB dapat menghambat pencapaian IPM (Sukirno, 2016). PDRB sendiri mempresentasikan total *output* berupa produk atau jasa yang dihasilkan, sekaligus menjadi ukuran perkembangan ekonomi serta keberhasilan pembangunan daerah (Badan Pusat Statistik, 2023).

PDRB memiliki keterkaitan yang erat dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), karena peningkatan pendapatan daerah berperan penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan serta pemenuhan kebutuhan hidup yang layak. Namun, peningkatan PDRB tidak selalu sejalan dengan peningkatan IPM, terutama jika pertumbuhan ekonomi tidak merata atau tidak dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat (Todaro, 2012). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji peran PDRB dalam mendukung pembangunan manusia, khususnya di daerah dengan capaian IPM yang masih rendah seperti Kabupaten Pemalang. Berikut data PDRB 6 Kabupaten dengan IPM terendah tersebut :

Table 1.3 PDRB 6 Kabupaten/Kota IPM Terendah Tahun 2019-2024

Kabupaten	Persentase Laju PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2020					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Batang	5,39	-1,29	4,88	5,97	5,53	6,03
Tegal	5,56	-1,48	3,71	5,13	4,93	5,07
Wonosobo	5,57	-1,64	3,68	5,02	4,30	4,57
Banjarnegara	5,60	-1,32	3,26	5,29	4,98	5,11
Pemalang	5,80	-0,611	4,28	5,08	4,14	5,11
Brebes	6,76	-0,47	2,57	5,50	3,74	5,02

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan data menurut aturan harga konstan, terlihat bahwa enam kabupaten dengan IPM terendah di Jawa Tengah mengalami pola fluktuasi yang erat kaitannya dengan kondisi nasional saat pandemi. Pada 2019, laju

PDRB relatif stabil dengan kisaran 5,37–6,76, misalnya Batang 5,39, Tegal 5,56, Wonosobo 5,37, Banjarnegara 5,60, Pemalang 5,80, dan Brebes 6,76, sedangkan rata-rata Jawa Tengah 5,36. Namun pada 2020, semua daerah mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19. Kontraksi terdalam dialami oleh Banjarnegara (-1,92) dan Wonosobo (-1,64), sedangkan Batang (-1,29) dan Tegal (-1,48) juga menunjukkan penurunan signifikan. Pemalang (-0,61) dan Brebes (-0,47) mengalami kontraksi lebih ringan, bahkan lebih baik dibandingkan rata-rata Jawa Tengah yang turun hingga -2,65.

Memasuki 2021, seluruh kabupaten kembali tumbuh positif, meskipun dengan kecepatan berbeda. Batang mencatat pemulihan ke level 4,88, Tegal 3,71, Wonosobo 3,88, Banjarnegara 4,28, Pemalang 4,36, dan Brebes 3,33, masih di bawah rata-rata provinsi sebesar 3,32%. Tahun 2022 laju pertumbuhan semakin meningkat, dengan Batang 5,97 dan Brebes 5,20 mulai mendekati rata-rata Jawa Tengah 5,31. Pada 2023, laju pertumbuhan relatif stabil, rata-rata di kisaran 4,90–5,53, tetapi tetap sedikit lebih rendah dibanding provinsi (4,97). Puncaknya pada 2024, hampir semua kabupaten menunjukkan pertumbuhan lebih baik: Brebes 6,03, Batang 5,97, Banjarnegara 4,98, Pemalang 4,57, Wonosobo 4,30, dan Tegal 5,05, sementara Jawa Tengah mencapai 5,03.

Data ini memperlihatkan bahwa meskipun keenam kabupaten berhasil bangkit dari kontraksi, terdapat variasi kecepatan pemulihan. Brebes dan Batang mampu tumbuh lebih tinggi dibanding rata-rata provinsi pada 2024, menunjukkan daya pemulihan ekonomi yang relatif kuat. Sebaliknya,

Wonosobo dan Pemalang justru cenderung tertinggal, dengan pertumbuhannya lebih rendah dibanding rata-rata provinsi. Perbedaan tersebut menjadi faktor penting yang turut memengaruhi kesenjangan pembangunan manusia (IPM) antar wilayah.

Selain PDRB, pengangguran juga menjadi faktor yang memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Lonjakan angka pengangguran secara langsung menekan pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya mengurangi taraf kesejahteraan serta mutu kehidupannya. Menurut (Sukirno, 2006), pengangguran tidak hanya menyebabkan berkurangnya pendapatan individu, tetapi juga menurunkan taraf kemakmuran masyarakat secara umum.

Table 1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka(TPT) 6 Kab/Kota IPM Terendah

Sumber :BPS Jawa Tengah

Kabupaten	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Batang	4,11	6,92	6,59	6,64	6,06	5,67
Tegal	8,12	9,82	9,97	9,64	8,60	7,53
Wonosobo	3,43	5,37	5,26	5,01	4,95	4,02
Banjarnega	4,44	5,86	5,86	6,38	6,26	5,57
Pemalang	6,45	7,64	6,71	6,63	6,55	6,63
Brebes	7,39	9,83	9,78	9,48	8,98	8,35

Dari data di atas, memperlihatkan pola yang cukup fluktuatif dan erat kaitannya dengan dampak pandemi COVID-19. Pada 2019, sebagian besar kabupaten mencatat TPT yang relatif moderat, seperti Batang 4,11%, Banjarnegara 4,44%, Pemalang 6,45%, Brebes 7,39%, Tegal 8,12%, dan terendah Wonosobo 3,43%, sedangkan rata-rata Jawa Tengah sebesar 4,44%. Namun pada 2020, TPT melonjak signifikan akibat pandemi, dengan Tegal mencapai 9,82%, Brebes 9,83%, dan Pemalang 7,64%, jauh di atas rata-rata provinsi (6,48%). Pada 2021, angka pengangguran mulai menurun di beberapa daerah, seperti Batang turun menjadi 6,59%, tetapi masih tinggi di kabupaten lain, misalnya Tegal 9,97% dan Brebes 9,78%. Tahun 2022 tren penurunan mulai terlihat lebih jelas, meskipun masih terdapat variasi: Brebes 9,48% dan Tegal 9,64% tetap menduduki posisi tertinggi, sementara Banjarnegara 5,01% dan Batang 6,64% lebih rendah dari rata-rata provinsi (5,31%).

Memasuki 2023–2024, sebagian besar kabupaten berhasil menurunkan TPT secara signifikan. Pada 2023, Brebes (8,98%) dan Tegal (8,60%) masih mencatat angka tertinggi, tetapi Banjarnegara (4,95%) dan Wonosobo (4,95%) berhasil menekan TPT mendekati rata-rata provinsi (5,13%). Pada 2024, perbaikan semakin nyata dengan Batang turun menjadi 5,67%, Pemalang 6,63%, dan Banjarnegara 4,07% sebagai yang terendah. Namun, Brebes (8,35%) dan Tegal (7,53%) tetap menghadapi masalah serius terkait pengangguran terbuka. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi tren penurunan pasca pandemi, kesenjangan antar kabupaten

masih cukup lebar, dan tingginya TPT di Brebes dan Tegal menjadi faktor penghambat utama dalam peningkatan IPM di kedua daerah tersebut.

Kondisi ini tidak hanya mengganggu stabilitas ekonomi, tetapi juga berpotensi memperlambat pembangunan manusia secara keseluruhan. Sementara itu, (Lugastoro, 2020) menjelaskan bahwa kemajuan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sama-sama berhubungan dan memberi dampak timbal balik satu sama lain. Hubungan ini akan semakin kuat apabila didukung oleh intervensi pemerintah melalui kebijakan yang tepat. Ketika keduanya saling memperkuat, maka akan tercipta sinergi positif bagi pencapaian tujuan pembangunan. Namun jika tidak seimbang, pertumbuhan ekonomi dan IPM justru dapat saling menghambat, sehingga capaian pembangunan nasional menjadi terhambat. Oleh karena itu, penting untuk memastikan keseimbangan antara peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia agar pembangunan berkelanjutan dapat terwujud.

Chapra (2000) menjelaskan bahwa pembangunan dalam perspektif Islam bertujuan mencapai *falāh* atau kesejahteraan menyeluruh, yang dicapai melalui peningkatan kualitas manusia secara berkeadilan, beretika, dan berorientasi kemaslahatan. Tanpa peningkatan kualitas manusia, pembangunan tidak akan menghasilkan kemajuan sosial yang merata maupun berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan manusia merupakan prasyarat bagi tercapainya kesejahteraan sosial dalam pandangan Islam.

Dalam konteks pembangunan daerah seperti Jawa Tengah, terutama di enam kabupaten dengan IPM terendah, pendekatan Islam mengenai

pembangunan manusia sangat relevan untuk mengatasi persoalan ketimpangan sosial, rendahnya capaian pendidikan, dan tingginya kemiskinan (Chapra, 2008). Perspektif Islam menekankan prinsip keadilan, pemerataan kesempatan, dan pemberdayaan kelompok lemah, sehingga pembangunan manusia diposisikan bukan hanya sebagai kebutuhan ekonomi, tetapi juga sebagai kewajiban moral demi terwujudnya kemaslahatan publik (Zulkhibri, 2015). Dalam hal ini, kemiskinan dipandang sebagai masalah sosial yang harus diatasi melalui distribusi kekayaan dan pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi (PDRB) seharusnya diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh penduduk, dan pengangguran menjadi perhatian karena menghambat partisipasi ekonomi serta pemberdayaan manusia. Dengan demikian, pembangunan manusia menurut perspektif Islam menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial, yang sangat relevan untuk meningkatkan IPM di wilayah-wilayah yang tertinggal.

Berdasarkan tinjauan pustaka, penelitian serupa telah banyak dilakukan, namun belum ada penelitian yang secara khusus memfokuskan analisis pada enam kabupaten dengan IPM terendah secara konsisten dalam kurun waktu yang lebih mutakhir (2019-2024). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis pengaruh ketiga variabel secara spesifik pada wilayah-wilayah yang tertinggal, sehingga hasilnya dapat menjadi bahan pertimbangan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Maka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul

“PENGARUH KEMISKINAN, PDRB DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) PADA 6 KABUPATEN DI PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN CAPAIAN IPM TERENDAH TAHUN 2019-2024 (KABUPATEN BATANG, TEGAL, WONOSOBO, BANJARNEGARA, PEMALANG DAN BREBES)”.

B. Rumusan Masalah

Menurut latar belakang, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Tingkat Kemiskinan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 6 Kabupaten dengan capaian IPM terendah di Jawa Tengah?
2. Apakah PDRB berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 6 Kabupaten dengan capaian IPM terendah di Jawa Tengah?
3. Apakah Tingkat Pengangguran berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 6 Kabupaten dengan capaian IPM terendah di Jawa Tengah?
4. Apakah Kemiskinan, PDRB dan Tingkat Pengangguran secara simultan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 6 Kabupaten dengan capaian IPM terendah di Jawa Tengah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) pada 6 Kabupaten dengan capaian IPM terendah di Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui pengaruh PDRB terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) pada 6 Kabupaten dengan capaian IPM terendah di Jawa Tengah.
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) pada 6 Kabupaten dengan capaian IPM terendah di Jawa Tengah.
4. Untuk mengetahui pengaruh kemiskinan, PDRB, dan pengangguran secara simultan terhadap indeks Pembangunan manusia (IPM) pada 6 Kabupaten dengan capaian IPM terendah di Jawa Tengah.

Hasil yang diharapkan yaitu mampu bermanfaat untuk perluasan teoritis maupun kepentingan praktis sebagai berikut:

i. Manfaat Teoritis

Memperluas pemahaman tentang pengaruh kemiskinan, PDRB dan pengangguran terhadap IPM, serta dapat digunakan untuk panduan para peneliti selanjutnya tentang masalah sama.

ii. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih mendalam terkait faktor-faktor untuk tolak ukur dalam mempertimbangkan kemiskinan, PDRB dan tingkat pengangguran terhadap IPM pada saat ini atau saat mendatang.

iii. Bagi Pemerintahan

Membagikan data untuk masukkan pemerintah sebagai pertimbangan mengambil keputusan sebuah kebijakan guna mendorong IPM terutama pada 6 Kabupaten capaian IPMnya terendah yaitu KABUPATEN BATANG, TEGAL, WONOSOBO, BANJARNEGARA, PEMALANG DAN BREBES.

iv. Bagi Penulis

Penelitian yang dilakukan untuk menambah pengetahuan penulis dan media penyaluran atas ilmu selama kuliah khususnya mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

D. Sistematika Pembahasan

Penulis membuat sistematika penelitian ini, agar mudah dipahami dan terlihat sistematis. Berikut sistematika penelitiannya:

BAB 1 : Berisi latar belakang, rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : Menjelaskan landasan teori, telaah Pustaka, kerangka berfikir dan hipotesis penelitian.

BAB III : Menjelaskan jenis penelitian, pendekatan penelitian, setting penelitian, populasi dan sampel, varabel dalam penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV : Menjelaskan hasil analisis dan pembahasannya.

BAB V : Berisi simpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data panel menggunakan Eviews dengan model terbaik *Fixed Effect* (FEM) yang telah dikoreksi autokorelasinya dengan metode *First Differencing*, maka Kesimpulan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Variabel kemiskinan berpengaruh negative dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sehingga peningkatan jumlah penduduk miskin terbukti menurunkan kualitas pembangunan manusia di enam kabupaten yang diteliti (Todaro&Smith, 2015).
2. Laju PDRB berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap IPM, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum memberikan dampak langsung maupun luas terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia (Sukirno, 2016).
3. Tingkat pengangguran berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM, artinya peningkatan tingkat pengangguran terbukti secara statistik menurunkan kualitas Pembangunan manusia (Todaro&Smith, 2015).
4. Secara simultan, kemiskinan, PDRB, dan pengangguran berpengaruh signifikan terhadap IPM, yang berarti ketiga variabel independen tetap memiliki kontribusi secara bersama-sama dalam menjelaskan variasi IPM (Baltagi, 2008).

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, berikut saran yang dapat diberikan.

1. Pemerintah daerah perlu memprioritaskan program pengurangan kemiskinan, karena kemiskinan terbukti signifikan menurunkan IPM. Upaya ini dapat dilakukan melalui peningkatan akses pada pendidikan, kesehatan, dan program peningkatan pendapatan Masyarakat.
2. Pertumbuhan ekonomi lebih diarahkan agar inklusif, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Kebijakan pemberdayaan UMKM dan peningkatan produktivitas sektor-sektor unggulan dapat dipertimbangkan (Kuncoro, 2012).
3. Pemerintah tetap perlu memperluas kesempatan kerja, meskipun pengangguran tidak signifikan dalam penelitian ini. Penciptaan lapangan kerja produktif berpotensi meningkatkan kualitas hidup masyarakat di masa mendatang (Suryahadi, 2012).
4. Penelitian selanjutnya disarankan menambah variabel lain seperti belanja pendidikan, kesehatan, atau tingkat ketimpangan agar dapat memberikan gambaran lebih lengkap mengenai determinan IPM (Basuki, 2014).
5. Metode estimasi lain seperti GLS atau Driscoll-Kraay dapat digunakan dalam penelitian berikutnya untuk mendapatkan estimasi yang lebih kuat dalam menghadapi kemungkinan pelanggaran asumsi klasik lainnya (Hoechle, 2007).

DAFTAR PUSTAKA

- A.Fitriani&Syamsudin. (2020). Kemiskinan dan Implikasinya terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Selatan. *Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 11, No. 1, Halaman. 55-66.
- Al-Ghazali. (1997). *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Ghazali. (t.thn.). *Ihya'Ulum ad-Din*. Bairut, Lebanon: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah.
- Al-Ghazali, A. H. (2000). *Maqashid al-shariah as philosophy of Islamic law*. International Institute of Islamic Thought.
- Al-Qurthubi. (2006). *Tafsir al-Qurtubi (Vol. 1–20)*. Beirut: Al-'ilmiyyah.
- Amanda&Susanto. (2021). Pengaruh Kemiskinan terhadap IPM Di Jawa Barat. *Ekonomi Pembangunan Daerah*, Vol. 8, No. 2, Halaman. 101-112.
- Amartya Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. new york: Alfred A. Knopf.
- Anand, S. &. (2000). Human development and economics sustainability. *World Development*, Vol.28, No.12, Hal.2029-2049.
- Arikunto, S. (2010). *Produser Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta Indonesia: Rineka Cipta.
- Arsyianti, I. S. (2017). *Ekonomi Pembangunan berbasis maqashid syariah*. Jakarta, Indonesia: Kencana.
- Backer G.S, G. S. (1993). *Human Capital : A Theoretical and empirical analysis, with special reference to education*. Chicago, USA: The University of Chicago Press.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). *Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta, Indonesia: Kementian PPN/Bappenas.
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Indeks pembanguna manusia 2015*. Diambil kembali dari BPS: <https://www.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2021, september 16). *Indeks Pembangunan manusia*. Retrieved from BPS: <https://www.bps.go.id>

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Produk domestik regional bruto Kabupaten/kota di indonesia menurut lapangan usaha 2018-2022*. Diambil kembali dari BPS RI: <https://www.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistika. (2023). *Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Provinsi*. Jakarta, Indonesia: BPS RI.
- Baltagi, B. (2008). *Econometric analysis of panel data (4th ed.)*. John Wiley & Sons.
- Baltagi, B. (2021). *Econometric Analysis of Panel Data (6th Edition)*. Amerika Serikat: Wiley.
- Basuki, A. (2014). *Ekonometrika untuk analisis ekonomi dan bisnis*. indonesia: Rajawali Pers.
- BPS. (2024). *Indeks Pembangunan Manusia*. Diambil kembali dari BPS: <https://www.bps.go.id>
- BPS. (2024). *Kabupaten Batang dalam angka 2024*. indonesia: bps kabupaten batang jateng.
- BPS. (2024). *Kabupaten Pemalang dalam angka 2024*. Indonesia: BPS Pemalang.
- BPS. (2024). *Kabupaten tegal dalam angka 2024*. indonesia: bps Kab.Tegal.
- BPS. (2024). *Kabupaten wonosono dalam angka 2024*. Indonesia: BPS Kab. Wonosobo.
- BPS. (2024, November 12). *Profil Kemiskinan Indonesia 1998–2024*. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistika: <https://www.bps.go.id>
- BPS. (2024, November 12). *Rata-rata Lama Sekolah Menurut Provinsi*. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistika Indonesia: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTg=/rata-rata-lama-sekolah-menurut-provinsi.html>
- BPS. (2025, mei 15). *[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia, 2019*. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistika Indonesia.
- BPS Jateng. (2024). *Jawa Tengah Dalam Angka 2024*. Indonesia: BPS PROVINSI JAWA TENGAH.
- Chapra, M. (2000). *The future of economics : An Islamic perspective*. Leicester, UK: The Islamic Foundation.

- Chapra, U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of maqasid al-shariah*. Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank.
- Dewi, R. K. (2019). Pembangunan Manusia Sebagai motor penggerak pembangunan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol. 19, No. 2 Halaman 115-124.
- Fadilah&Nugroho. (2020). Analisis Pengaruh PDRB, Kemiskinan dan Pengangguran terhadap IPM di Indonesia. *Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 7, No. 1, Halaman 33-47.
- Fadilah, N. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, vol.18, No.2, Hal. 145-158.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBS SPSS 21 (edisi 7)*. Semarang Indonesia: Universitas Diponegoro.
- Gujarati&Porter. (2012). *Basic Econometrics*. New York: McGraw-Hill.
- Gujarati, P. &. (2009). *Basic Econometrics (5th edition)*. Amerika Serikat: McGraw-Hill Higher Education.
- Handayani&Wicaksono, A. (2017). Determinan IPM Di Indonesia: Peran PDRB perkapita dan Kemiskinan. *Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, Vol. 7, No. 1, Halaman. 56-67.
- Haq, M. u. (1995). *Reflections on Human Development*. New York: Oxford University Press.
- Hoechle, D. (2007). Robust standar errors for panel regressions with cross section dependence. *The Stata* , 7(3), 281-312.
- Hotchkiss, B. E. (2012). *The Economics of labor markets edisi 8*. Mason, Ohio, USA: Cengage Learning.
- Huda, M. (2015). Pengembangan kualitas sumber daya manusia dalam perspektif pembangunan berkelanjutan. *Jurnal sosial dan Humaniora*, Vol. 6, No. 1. Halaman 45-53.
- Ibn Kathir, I. (2000). *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm (Vol. 1–8)*. Riyadh: Darussalam Publishers.
- Ibn Taimiyah, I. (1981). *Hisbah fi al-islam*. Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyyah.

- International Labour Organization. (2022). *Employment and Unemployment Concepts*. Geneva: ILO.
- Keynes J.M, J. m. (1936). *the general theory of employment, interest and money*. London: Macmillan.
- Khaldun, I. (1958). *Al-Muqaddimah*. Cairo: Dar al-Qalam.
- Khikmah, L. L. (2020). Paradigma Pembangunan Berbasis Manusia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol.7, no. 1. Hal 33-42.
- Kuncoro, M. (2012). *Ekonomi pembangunan : teori, masalah, dan kebijakan*. Indonesia: UPP STIM YKPN.
- Kurniawan&Fitriani. (2017). Pengaruh Pengangguran terhadap IPM Di Indonesia. *Ekonomi dan Pembangunan*, Vol.18, No. 2, Halaman 145-156.
- Lestari. (2019). Analisis Pengaruh Kemiskinan dan PDRB Per Kapita terhadap IPM di Kabupaten Banyumas. *Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, Vol. 8, No. 1, Hal. 32-45.
- Lestari&Wahyudi. (2019). Analisi Pengaruh PDRB Terhadap IPM Di Jawa Tengah. *Ekonomi Daerah*, Vol. 14, No. 2, Halaman. 89-102.
- Lubis, M. (2018). *Metodologi penelitian kuantitatif*. Jakarta, Indonesia: Kencana.
- Lubis, N. &. (2021). Analisis IPM di Provinsi Sumatera : Pendekatan data panel. *Ekonomi Regional*, Vol.7, No.1, Hal.34-45.
- Lucas, R. (1988). On the Mechanics of Economic Development. *Monetary Economics*, 22(1), 3-42.
- Lugastoro, B. (2020). Pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia di Indonesia. *Jurnal ekonomi pembangunan*, Vol.21, No. 1, Halaman. 45-57.
- Mankiw, N. G. (2021). *Principles of economics*. Boston, Massachusetts: Cengage Learning.
- Mulyono. (2021). Pengaruh pendidikan, PDRB, dan kemiskinan terhadap IPM di Kabupaten Purworejo. *Ilmu Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, Vol.6, No. 2, Hal. 112-123.
- Mulyono, S. (2018). Pengangguran dan Dampaknya terhadap IPM Di Jawa Tengah. *Pembangunan Daerah*, Vol.12, No.3, Halaman. 200-212.
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian cetakan ke 7*. Bogor, Indonesia: Galia Indonesia.

- Norton, S. W. (2002). Economics Growth and Proverty : in search of trickle-down. *Cato journal*, Vol. 22, No. 2, Halaman. 263-277.
- Nugroho. (2022). Pengaruh Kemiskinan, PDRB, dan pengangguran terhadap IPM di Kabupaten Sukoharjo. *Ekonomi Pembangunan Daerah*, Vol. 7, No. 1, Hal. 45-58.
- Nurhayati. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat. *Ekonomi Regional*.
- Nurse, R. (1953). *Problems of capital formation in underdeveloped countries*. Oxford: Oxford University Press.
- Paul Streeten et al., S. j. (1981). *Firts things first : Meeting basic human needs in developing countries*. New York: Oxford University Press.
- Pratama. (2020). Analisis pengaruh Kemiskinan, PDRB, dan pengangguran terhadap IPM di Kabupaten Kendal. *Ekonomi dan Kebijakan Publik Daerah*, Vol.9, No.2, Hal.112-124.
- Pratama, A. (2020). Hubungan PDRB perkapita dengan IPM Di Indonesia. *Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 25, No. 1, Halaman. 34-45.
- Putra&Sari. (2021). Pengaruh kemiskinan, PDRB, dan tingkat pengangguran terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi jawa tengah. *jurnal ekonomi pembangunan*, Vol. 19, No. 2, Halaman 145-158.
- R.L.Thomas. (2018). *Macroeconomics and Unemployment Issues*. Oxford, UK: Oxford University Press.
- R.Rahmawati&A.Setiawan. (2020). Analisis Pengaruh Kemiskinan terhadap IPM Di Provinsi Jawa Tengah. *Ilmu Ekonomi*, Vol. 9, No. 3, Halaman. 210-220.
- Rintuh, M. (2003). *Kemiskinan dan upaya penanggulangannya*. Jakarta, Indonesia: Pustaka Utama.
- Romer. (1986). Increasing returns and long-run growrt. *Journal of political economy*, 94(5), 1002–1037.
- Romer, P. M. (1990). Endogenous Technological Change. *Journal of Political Economy*, Vol. 98(5) No. 2, Halaman S71-S102.
- Sanusi, A. (2011). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta, Indonesia: Salemba Empat.

- Saputra. (2020). Pengaruh Kemiskinan, PDRB dan Pengangguran terhadap IPM di Kabupaten Brebes. *Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, Vol.7, No.1, Hal.55-68.
- Saputra&Putri. (2021). Pengangguran dan Kemiskinan : Dampaknya terhadap IPM Di Indonesia. *Sosial Ekonomi*, Vol. 9, No. 1, Halaman. 77-89.
- Streeten, P. (. (1979). Basic Needs: Premises and Promises. *Journal of Policy Modeling*, 1(1), 136–146.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung, Indonesia: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung, Indonesia: Alfabeta.
- Suharto, E. (2014). *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*. Bandung, Indonesia: Alfabeta.
- Sukirno, S. (2006). *Makroekonomi : Teori pengantar Edisi 3*. Jakarta, Indonesia: Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, S. (2016). *Makroekonomi : Teori pengantar*. Jakarta, Indonesia: Rajawali Pers.
- Suryahadi, A. S. (2012). Economics growth and poverty reduction in indonesia before and after the asian financial crisis. *bulletin of Indonesian economics*, 48(2), 209-227.
- Todaro&Smith. (2011). *Economic Development*. Boston, Massachusetts: Addison-Wesley (Pearson Education Imprint).
- Todaro&Smith. (2012). *Pembangunan ekonomi, Edisi. 11, Jilid. 1*. Jakarta, Indonesia: Erlangga.
- Todaro&Smith. (2015). *Economic Development edisi 12*. Harlow, England: Pearson Education Limited.
- Todaro&Smith. (2020). *Economic Development edisi 13*. Harlow, England: Pearson Education.
- Todaro, M. P. (2012). *Economic Development edisi ke-12*. Amerika Serikat: Pearson.
- UNDP. (1990). *Human development report 1990*. New York: Oxford University Press. Diambil kembali dari UNDP.

- UNDP. (2023). *Human Development Report 2023/2024: Breaking the Gridlock*. United Nations Development Programme (UNDP).
- United Nations Development Programme. (2020). *Human development report 2020 : The next frontier-human development and the antropocene*. New York: UNDP.
- Utama, P. &. (2019). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan pendidikan terhadap IPM di Indonesia. *Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol.10, No.1, Hal. 55-67.
- Waston, J. D. (1950). *Testing for Serial Corelation in Least Squares Regression*. Inggris: Oxford University Press.
- Widarjono, A. (2007). *Ekonometrika Teori dan aplikasi (edisi ke-2)*. Yogyakarta, Indonesia: UPP STIM YKPN.
- Wijaya, A. (2018). *Pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat*. Jakarta, Indonesia: Prenada Media.
- Wooldbrigde, J. (2016). *Introductory econometrics : A modern approach (6th)*. Cengage learning.
- Wooldridge. (2013). *Introductory Econometrics A: Modern Approach*. Amerika Serikat: Cengage Learning.
- World Bank. (2018). *Proverty and Shared Prosperity 2018 : Piecing together the proverty puzzel*. Washington, DC: World Bank Group.
- World Bank. (2020). *Poverty and Shared Prosperity 2020 : Reversals of fortune*. Wasington, DC: World Bank Publications.
- World Bank. (2023). *World Development Indicators*. The World Bank Group.
- Zam-zam, F. (2017). *Ekonomi pembangunan teori dan aplikasi*. Jakarta, Indonesia: Raja Grafindo Persada.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta, Indonesia: Yayasan Obor Indonesia.